

Implementation of The Climate Village Program By The Environmental Agency in RW 20, Haurpanggung Village, Garut Regency

Implementasi Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut

**Diva Agita Putri¹, Daffa Wisika Arifana², Nabila Kalimatussadah³, Najla Nurzahra⁴,
Mira Rosana⁵**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pasundan^{1,2,3,4,5}

divaagita42@gmail.com¹, daffawisika7@gmail.com², khalimatusadah14@gmail.com³,
zahranurnajla@gmail.com⁴, mira.rosana@unpas.ac.id⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Iklim di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut telah dilaksanakan sesuai kerangka kebijakan nasional, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 serta Surat Edaran Bupati Garut Tahun 2023. Meskipun demikian, capaian program masih berada pada kategori Pratama dengan skor 32,67%, melalui kegiatan adaptasi seperti biopori, urban farming, perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan mitigasi berupa pemilahan sampah, Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon (GTPP), dan Jumat Bersih. Efektivitas program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat yang belum merata, serta kondisi geografis permukiman padat di bantaran sungai yang meningkatkan risiko banjir dan pencemaran. Di sisi lain, pelaksanaan Program Kampung Iklim didukung oleh budaya gotong royong, peran aktif KSM Sabilulungan, serta dukungan kelembagaan lokal dari RT/RW dan fasilitator. Program ini juga berdampak positif terhadap penurunan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan Program Kampung Iklim di wilayah rentan seperti RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh kapasitas organisasi pelaksana, tingkat partisipasi masyarakat, dan penguatan dukungan kelembagaan lokal.

Kata Kunci : Program Kampung Iklim (ProKlim), Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Climate Village Program (ProKlim) by the Garut Regency Environment Agency in RW 20, Haurpanggung Village, Garut Regency, and to analyze the supporting and inhibiting factors in its implementation. This study applies a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of the Climate Village Program in RW 20, Haurpanggung Village, Garut Regency, has been carried out in accordance with the national policy framework, namely Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 and the Circular Letter of the Regent of Garut in 2023. However, the program's achievement is still in the Primary category with a score of 32.67%, through adaptation activities such as biopores, urban farming, clean and healthy living behaviors, and mitigation activities such as waste sorting, the Plant and Care for Trees Movement (GTPP), and Clean Friday. The effectiveness of the program still faces obstacles in the form of limited human resources, minimal budget allocation, low and uneven community participation, and the geographical conditions of densely populated settlements along riverbanks, which increase the risk of flooding and pollution. On the other hand, the implementation of the Climate Village Program is supported by a culture of mutual cooperation, the active role of the Sabilulungan Community Empowerment Group (KSM), and institutional support from local neighborhood associations (RT/RW) and facilitators. This program also has a positive impact on reducing the habit of littering and increasing public awareness of the environment. Thus, the success of the Climate Village Program in vulnerable areas such as RW 20, Haurpanggung Village, Garut Regency is not only determined by regulatory aspects, but is also significantly influenced by the capacity of the implementing organization, the level of community participation, and the strengthening of local institutional support.

Keywords: Climate Village Program (ProKlim), Policy Implementation, Community Participation

1. Pendahuluan

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Garut menjadi salah satu fokus utama yang menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama terkait tingginya tingkat pencemaran yang berasal dari berbagai aktivitas masyarakat maupun industri. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah secara tepat semakin memperburuk keadaan, terutama di wilayah yang berada di bantaran sungai. Kondisi tersebut juga terlihat di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut, yang menghadapi persoalan pembuangan sampah sembarangan, degradasi lingkungan, serta kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut melaksanakan Program Kampung Iklim (ProKlim), sebuah program nasional yang berorientasi pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pendekatan partisipatif. Kegiatan yang dikembangkan di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut meliputi pengelolaan sampah, penghijauan pekarangan, praktik pertanian rendah karbon, pemanfaatan energi terbarukan, serta kegiatan rutin seperti Jumat Bersih dan Gerakan Tanam dan Pelihara Pohon. Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi, pendampingan teknis, inventarisasi kegiatan, hingga pelaporan ke Sistem Registri Nasional.

Namun, dalam implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah ke sungai. Meskipun baru meraih apresiasi ProKlim kategori Pratama, program ini mulai menunjukkan dampak positif seperti berkurangnya pembuangan sampah di lahan terbuka dan meningkatnya praktik pemilahan sampah.

Dukungan kebijakan turut memperkuat pelaksanaan Program Kampung Iklim, antara lain melalui Surat Edaran Bupati Nomor 500.6.12.2/3919/DLHK Tahun 2023 tentang pelaksanaan Program Kampung Iklim serta Perda No. 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Di tingkat nasional kebijakan ini juga diperkuat oleh Permen LHK No. P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016. Dalam konteks RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut, dukungan kebijakan ini menjadi landasan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong efektivitas implementasi ProKlim di wilayah bantaran sungai tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Implementasi Program Kampung Iklim dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut, termasuk proses pelaksanaannya, aktor yang terlibat, dan hambatan yang dihadapi dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat.

2. Metode

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, karena dinilai paling tepat untuk memahami proses serta menggambarkan secara mendalam berbagai permasalahan yang muncul di lapangan terkait implementasi Program Kampung Iklim di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai dinamika sosial, bentuk partisipasi masyarakat, serta mekanisme kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program tersebut. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi nyata yang terjadi di wilayah penelitian.

Sejalan dengan pandangan MeMillan dan Schumacher (dalam Siyoto, 2015), penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan langsung terhadap manusia dalam lingkungan atau konteks kehidupannya, serta menjalin interaksi menggunakan bahasa dan istilah yang mereka pahami. Pendekatan ini membantu peneliti menjelaskan fenomena berdasarkan realitas yang ditemukan di lapangan. Sementara itu, Mantra (dalam Moleong, 2007) menjelaskan bahwa

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ungkapan lisan maupun tulisan dari subjek penelitian, disertai perilaku yang dapat diamati, sehingga peneliti mampu menggali karakteristik unik individu maupun kelompok secara mendalam.

Menurut Satibi (2017), penelitian kualitatif secara substansi merupakan jenis penelitian yang esensinya bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang bersifat interpretative serta tidak menggunakan hasil statistika sebagai dasar. Oleh sebab itu, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkap fakta dan kondisi aktual terkait pelaksanaan Program Kampung Iklim, termasuk hambatan dan dinamika sosial yang menyertainya. Oleh karena itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang faktual, runtut, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kegiatan penelitian ini telah melewati beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Fasilitator Ecovillage, dan Ketua KSM ProKlim Sabilulungan yang terlibat dalam kegiatan ProKlim, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan dicatat dalam dua bentuk, yaitu catatan deskriptif berisi uraian objektif, serta catatan reflektif yang memuat interpretasi dan analisis awal peneliti untuk mengarahkan pengumpulan data berikutnya agar lebih fokus.
2. Reduksi data, yaitu setelah data terkumpul dilakukan reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan. Proses ini menyaring serta menyusun temuan secara sistematis agar hanya data penting yang dipertahankan, sehingga analisis lebih tajam, terorganisir, dan memudahkan penarikan kesimpulan.
3. Penyajian data, yaitu dilakukan dengan menyeleksi dan menyusun informasi relevan secara sistematis agar analisis lebih fokus, temuan terorganisir, dan kesimpulan mudah ditarik secara akurat.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan sejak awal hingga akhir pengumpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara, lalu semakin menguat seiring bertambahnya data hingga menghasilkan makna yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini menghasilkan uraian deskriptif yang menggambarkan realitas implementasi Program Kampung Iklim di RW 20 Desa Haurpanggung secara jelas, sistematis, dan komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dilaksanakan di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut menunjukkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat pada wilayah padat penduduk yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, serta program ini telah berjalan sesuai dengan pedoman kebijakan pemerintah pusat dan arahan pemerintah daerah. Kegiatan adaptasi yang terlaksana meliputi pembuatan biopori, ecoenzim, penghematan air, pembangunan tanggul banjir, sistem evakuasi, urban farming, Posyandu, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Pada aspek mitigasi, masyarakat terlibat dalam pemilahan sampah, penggunaan energi ramah lingkungan, pertanian rendah karbon, penghijauan, serta konservasi keanekaragaman hayati.

Sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, KSM ProKlim Sabilulungan, fasilitator Ecovillage, dan perangkat RT/RW berhasil mendorong partisipasi masyarakat, terutama melalui kegiatan Jumat Bersih yang dilakukan rutin. Hasil penilaian pada Sistem Registri Nasional (SRN) tahun 2024 menunjukkan capaian 32,67% dengan kategori Pratama, yang merefleksikan adanya kesadaran awal masyarakat meskipun kapasitas kelembagaan dan upaya mitigasi masih perlu diperkuat.

Kondisi sosial, padatnya permukiman bantaran sungai, serta volume sampah yang tinggi menjadi faktor eksternal yang memengaruhi efektivitas program. Keterbatasan SDM dan

anggaran di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut juga berdampak pada terbatasnya pembinaan lapangan. Meskipun demikian, ProKlim telah menghasilkan perubahan perilaku positif serta peningkatan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan.



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Wawancara Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut

Hasil penelitian terkait dengan Implementasi Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut yang mengacu pada empat variabel menurut Thomas B. Smith (dalam Tachjan, 2006:37), yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang Diidealkan Program Kampung Iklim di RW 20 Desa Haurpanggung menunjukkan bahwa program sudah dilaksanakan sesuai pedoman Permen LHK Tahun 2016 dan Surat Edaran Bupati Garut Tahun 2023. Kebijakan ini relevan dengan kebutuhan lokal seperti pengurangan sampah, penghijauan di lahan sempit, serta mitigasi banjir. Namun, distribusi pemahaman masyarakat terhadap kebijakan belum merata sehingga diperlukan sosialisasi lebih intensif.
2. Kelompok sasaran menunjukkan tren positif melalui kegiatan rutin seperti jumsih, pembuatan biopori, pengolahan ecoenzim, serta pemilahan sampah rumah tangga. Meskipun demikian, masih terdapat masyarakat yang berpandangan bahwa kegiatan harus didukung dana, sehingga memerlukan pendekatan edukatif yang lebih intensif. Dukungan masyarakat semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan.
3. Organisasi Pelaksana yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut berperan sebagai pelaksana utama, namun keterbatasan SDM dan anggaran menjadi kendala. Meskipun demikian, kemampuan teknis pelaksana dinilai cukup kompeten, didukung oleh koordinasi yang baik dengan fasilitator Ecovillage, RT/RW, dan KSM Sabilulungan. Keterlibatan perangkat desa masih bersifat motivasional, sementara dukungan finansial dan fasilitas belum maksimal.
4. Faktor Lingkungan menunjukkan bahwa kondisi geografis RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut, yang padat dan berada di bantaran sungai menjadi hambatan teknis. Kedekatan dengan pasar menambah beban sampah harian. Namun, modal sosial seperti budaya gotong royong dan kegiatan Jumsih menjadi faktor pendorong kuat. Konflik kepentingan antara mata pencaharian warga yaitu penambangan pasir sungai dan pelestarian lingkungan memerlukan komunikasi yang lebih adaptif.

Berikut adalah dokumentasi setelah kegiatan observasi dan wawancara, yang menampilkan momen foto bersama antara peneliti beserta fasilitator ecovillage dan KSM Proklm Sabilulungan:



Gambar 2. Dokumentasi Setelah Sesi Wawancara

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Kampung Iklim (ProKlim) di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan selaras dengan pedoman nasional melalui Permen LHK Tahun 2016 serta diperkuat oleh Surat Edaran Bupati Garut Tahun 2023. Program ini terbukti relevan dengan kebutuhan lokal, terutama dalam menangani permasalahan sampah, keterbatasan ruang terbuka hijau, dan risiko banjir di wilayah bantaran sungai.

Perkembangan partisipasi masyarakat juga menunjukkan peningkatan, meskipun masih belum merata karena sebagian warga memiliki persepsi bahwa kegiatan harus didukung oleh bantuan dana. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup menjadi tantangan utama, di samping minimnya dukungan CSR dan kondisi geografis yang kompleks. Namun demikian, kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, perangkat RT/RW, KSM Sabilulungan, dan fasilitator Ecovillage mampu menjaga keberlangsungan program.

Secara keseluruhan, ProKlim di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat dan adanya perubahan perilaku menuju pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Dengan penguatan kelembagaan dan strategi edukasi yang berkelanjutan, program ini memiliki potensi untuk berkembang ke kategori yang lebih tinggi serta berkontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim di tingkat komunitas.

Berikut adalah saran sederhana dan relevan untuk meningkatkan Program Kampung Iklim di RW 20 Desa Haurpanggung Kabupaten Garut:

1. Dinas Lingkungan Hidup perlu mengembangkan metode sosialisasi yang lebih intensif, kreatif, dan mudah dipahami masyarakat, seperti lokakarya interaktif, edukasi berbasis tokoh lokal, serta pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan pemahaman mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
2. Pemerintah daerah perlu menyediakan tambahan personel pendamping di tingkat RW/kelurahan serta meningkatkan alokasi anggaran khusus ProKlim, termasuk membangun kerja sama dengan sektor swasta melalui mekanisme CSR agar sarana, prasarana, dan kegiatan lingkungan dapat dilaksanakan lebih optimal.
3. Upaya pelestarian lingkungan perlu diintegrasikan dengan nilai budaya setempat, seperti pemberian apresiasi bagi kelompok yang aktif, pembentukan agen perubahan dari unsur tokoh masyarakat, dan penguatan kegiatan lingkungan berbasis gotong royong untuk meningkatkan rasa kepemilikan bersama terhadap program.
4. Sinergi dengan Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga pendidikan, serta lembaga swadaya masyarakat sangat diperlukan untuk menyediakan dukungan sumber daya dan teknologi. Upaya ini diharapkan mampu mendukung keberlanjutan program sekaligus mendorong inovasi ekonomi sirkular di tingkat komunitas.

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fajar, M. F. A., & Rafi, M. R. Y. (2023). Kebijakan mitigasi penanganan banjir di Kota Pekanbaru melalui Program Kampung Iklim. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(1), 10–31.
- Heryana, A. (2018). Informan dan pemilihan informan dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Kualitatif*, 1, 1–15.
- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Iwan, & Satibi. (2017). *Metode penelitian administrasi publik*. Lembaga Penelitian Unpas Press.
- Manzilati, A. (2017). *Metode penelitian kualitatif: Metode aplikasi*. UB Press.
- Mariane, I., Gnagey, M. R., Karali, M. A. M. I., & Hardiyanti, E. (2025). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 16(1), 93–108.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta.
- Pasolong, H. (2010). *Teori administrasi publik*. Alfabeta.
- Polancik, G. (2009). *Empirical research method poster*.
- Priyono. (2020). *Administrasi publik kontemporer*. Rajawali Pers.
- Riani, A., Suwitri, S., & Kurniasih, Y. (2024). Implementasi Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 28–40.
- Siyoto, S., & Sodiq, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Nusantara.
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI Bandung.